

MENGATASI KRISIS LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN NILAI-NILAI PAÑCA SILA: PERSPEKTIF ETIKA BUDDHISME

Costantinus Fatlolon

Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik Santo Yohanes Peningjil Ambon
Email: costanfata@gmail.com

Abstrak

Krisis lingkungan hidup telah menjadi bagian dari malapetaka umat manusia secara global. Dari perspektif etika Buddhisme, krisis ini dapat dilihat sebagai buah *karmatik* dari degradasi moral manusia yang dimotivasi oleh keserakahan, kebencian, dan delusi. Pertanyaan yang muncul ialah: “Bagaimana jalan keluar yang ditawarkan etika Buddhisme untuk mengatasi krisis lingkungan hidup saat ini?” Tulisan ini menawarkan konsep *Pañca sila* dalam etika Buddhisme sebagai dasar-dasar moral praktis untuk merenovasi lingkungan hidup dan membangun alam menjadi tempat tinggal yang damai dan adil.

Kata Kunci: Buddhisme, Etika, Krisis, Lingkungan Hidup, Pañca sila.

Abstract

Environmental crisis has become part of the global human catastrophe. From the perspective of Buddhist ethics, this crisis can be seen as the karmatic fruit of human moral degradation motivated by greed, hatred, and delusion. The question that arises is: “What is the solution offered by Buddhist ethics to overcome the current environmental crisis?” This article offers the concept of Pañca sila in Buddhist ethics as the practical moral foundations for renovating environment and building nature into a peaceful and just dwelling place.

Key words: Buddhism, Crisis, Ethics, Environment, Pañca sila.

PENDAHULUAN

Pada tahun 1993, Perlemen Agama-Agama Sedunia (*The Parliament of the World’s Religions*) mengeluarkan sebuah deklarasi bersama yang berjudul “Etika Global” (*A Global Ethic*). Pada awal deklarasi tersebut, Parlemen secara tegas menyebut salah satu krisis yang menerpa negara-negara sejagat adalah bidang lingkungan hidup. Parlemen menyaksikan bahwa dunia yang kita diami saat ini semakin dijarah dengan kejam dan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup serta mengancam hidup manusia (Parliament, 1993: 17).

Berhadapan dengan krisis lingkungan hidup, Parlemen menekankan bahwa dunia global merupakan satu kesatuan sistem yang senantiasa berada dalam ketergantungan satu sama lain (*inter-dependence*). Pengrusakan satu anasir akan mempegaruhi keberadaan dan keberlanjutan anasir lain dalam dunia. Karena itu, Parlemen menawarkan “sebuah etika global,” yaitu “kesepakatan fundamental mengenai nilai-nilai, standar-standar yang tetap, dan perilaku personal” (Parliament, 1993: 21) untuk menjadikan dunia ini sebagai sebuah rumah bersama yang utuh, aman dan damai. Salah satu nilai yang ditawarkan Parlemen untuk membaharui dunia dan lingkungan hidup adalah “pemikiran positif, pertobatan hati” (*positive thinking, a conversion of the hearth*). Parlemen yakin bahwa dunia dan lingkungan hidup hanya mungkin menjadi

hunian yang aman dan damai apabila ada perubahan dalam kesadaran atau hati manusia (Parliament, 1993: 36).

Sudah hampir tiga dekade berselang sejak imperatif etis itu dipromulgasikan Parlemen kepada segenap penduduk global. Akan tetapi perubahan pikiran dan hati manusia global belum sepenuhnya terlihat dalam perubahan lingkungan hidup yang lebih baik. Sebaliknya, rumah bersama manusia semakin terkapar sakit dengan berbagai masalah berat seperti pemanasan iklim global; hilangnya keanekaragaman hayati sebagai akibat pengrusakan habitat, pengrusakan hutan, perburuan liar dan perubahan penggunaan lahan; pencemaran lingkungan hidup baik air, tanah, maupun udara; krisis air; pengurangan hutan atau deforestasi; kurangnya pemanfaatan sumber daya berkelanjutan; dan pencemaran plastik (Rosadi, 2023; Mondry, 2023).

Berhadapan dengan semua informasi di atas para ahli pada umumnya sepakat bahwa krisis lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari sikap dan prinsip manusia yang semakin materialistis. Mengejar kesenangan indera dan memperoleh kepemilikan telah menjadi tujuan utama manusia. Tujuan ini pada akhirnya mengakibatkan malapetaka bagi manusia (Indasara, 2008: 55). Tidak hanya krisis lingkungan hidup menyebabkan malapetaka bagi ekosistem tetapi krisis yang sama telah berbalik menghukum manusia itu sendiri (bdk. Indasara, 2008: 57).

Krisis lingkungan hidup telah mendesak para ahli, peminat, dan penulis etika Buddhisme untuk mencari jalan keluar untuk mengatasinya. Beberapa penulis seperti Purnama et al (2022) dan Bayuseto (2023) mengajukan konsep *eco-Dhamma*, yaitu ajaran tentang hubungan tibal-balik, sebab-akibat dan saling ketergantungan antar makhluk hidup dalam alam semesta. Lingkungan hidup hanya akan terpelihara apabila manusia manusia mengatasi ketamakan untuk memperkaya diri sendiri. Penulis lain seperti Verma (2019), Raghawi (2023) dan Phorst (2012) mengajukan konsep perkembangan berkelanjutan dengan menekankan penggunaan sumber daya yang ada tanpa mengorbankannya demi generasi yang akan datang. Hal ini memerlukan pandangan tentang dunia sebagai suatu sistem saling ketergantungan dalam ruang dan waktu. Untuk itu prinsip etis bersikap baik dan hidup selaras dengan semua makhluk hidup lainnya sangatlah dibutuhkan untuk diperkenalkan kembali ke dalam pikiran masyarakat untuk mengurangi dampak negatif penghancuran lingkungan hidup.

Berbeda dengan karya-karya sebelumnya, penelitian ini menekankan bahwa manusia harus bertanggung jawab secara moral atas kebaikan dan kelestarian lingkungan. “Bagaimana etika Buddhisme menawarkan solusi untuk krisis lingkungan hidup saat ini?” adalah pertanyaan utama dari penelitian ini. Tulisan ini menekankan bahwa indera manusia telah mendominasi dirinya hingga batas tertentu dan bahwa nafsu untuk mengejar kepentingan diri sendiri telah

memperbudak manusia. Krisis lingkungan yang kita hadapi saat ini dapat dilihat sebagai hasil karmatik dari degradasi moral manusia yang dipicu oleh delusi, kebencian, dan keserakahan.

Tujuan utama tulisan ini adalah untuk menjelaskan konsep *Pañca sila*, yang merupakan bagian dari etika Buddha, yang berkaitan dengan bagaimana manusia seharusnya memperlakukan alam sebagai bagian dari dirinya sendiri dengan cara yang baik dan benar. Filosofi moral praktis Buddhisme ini dipilih sebagai dasar etika lingkungan karena mengajarkan kepedulian terhadap semua makhluk hidup, termasuk manusia, tumbuhan, dan hewan. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan dunia etika Buddhisme bersifat holistik, yaitu mencari harmoni di semua tingkatan, baik di dalam diri setiap orang, di antara anggota masyarakat, maupun di dalam alam semesta, di mana manusia hanyalah salah satu bagian dari lingkungan (Silva, 1998: xiv; Wijaya dan Priastana, 2020: 1).

METODE PENULISAN

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu studi yang mempelajari berbagai literatur dalam bentuk buku, jurnal, catatan, laporan yang tersedia agar dapat memahami secara komprehensif masalah yang sedang diteliti. Dalam konteks ini, penelitian ini ingin memahami secara komprehensif pandangan etika Buddhisme tentang bagaimana mengatasi krisis lingkungan hidup.

Pembahasan tulisan ini dibagi atas tiga bagian. Bagian pertama menjelaskan ajaran Buddhisme tentang lingkungan, secara khusus ajaran Buddha tentang prinsip saling ketergantungan dan perubahan abadi di alam. Bagian kedua tulisan ini menjelaskan ajaran Buddha tentang sikap egois terhadap lingkungan, termasuk akar penyebabnya. Menurut Sang Buddha, degradasi moralitas manusia menimbulkan krisis lingkungan yang dimotivasi oleh keserakahan, kebencian, dan delusi. Akhirnya, bagian ketiga mengusulkan ajaran etika Buddhisme tentang kelestarian lingkungan hidup berdasarkan *Pañca sila*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ajaran Budhisme tentang Lingkungan Hidup

Istilah ‘lingkungan hidup’ merupakan terjemahan Bahasa Inggris *environment*. Kata ini merupakan turunan kata *environ* dari kata kerja bahasa Perancis *Environner* yang berarti “mengelilingi” (*to surround*) atau “mengitari” (*to encircle*). Secara umum, istilah "lingkungan hidup" didefinisikan sebagai "alam sekitar", yang mencakup lingkungan fisik umum bagi semua makhluk hidup dan termasuk udara, air, tanah, tumbuhan, satwa liar, flora, dan fauna (Kumar, 2018: 314). Dengan kata lain, istilah ini biasanya mengacu pada dunia alami, atau lingkungan sekitar di mana semua makhluk hidup hidup, berkembang, dan binasa (Sahni, 2008: 34). Oleh karena itu, Aril Kumar menyatakan,

Kata “Lingkungan Hidup” dalam arti etimologis mempunyai arti lingkungan sekitar, terutama pengaruh-pengaruh material dan rohani yang mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan keberadaan suatu makhluk hidup. Artinya adalah keadaan atau keadaan yang melingkupi organisme atau kelompok organisme, atau kompleksnya kondisi sosial atau budaya yang mempengaruhi individu atau komunitas... [D]alam konteks manusia, lingkungan hidup adalah penjumlahan dari semua faktor sosial, ekonomi, biologis, fisik atau kimia yang membentuk lingkungan sekitar manusia, yang sekaligus pencipta dan membentuk lingkungannya sendiri (Kumar, 2018: 315).

Berdasarkan penjelasan di atas, tumbuhan dan hewan, termasuk manusia, merupakan komponen dasar lingkungan hidup. Secara umum, komponen lingkungan hidup mencakup dua kategori: komponen biotik dan komponen abiotik. Kategori abiotik mencakup elemen seperti iklim, yang mencakup energi, suhu, udara, cahaya, kelembaban, hujan, dan lain-lain; elemen isografik, seperti gunung besar dan lereng; elemen sumber daya air, seperti laut, danau, kolam, sungai, air bawah tanah, dan sebagainya; elemen tanah, seperti tambang, batuan, dan mineral bawah tanah. Sedangkan komponen biotik termasuk mikroorganisme, flora-fauna, burung, pohon, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya (Kumar, 2018: 316).

Dengan demikian dalam Buddhisme istilah lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari semua hal di sekitarnya baik hayati maupun non-hayati dan kondisi-kondisi yang mempengaruhi kehidupan organisme atau populasi individu, termasuk manusia. Dengan kata lain, lingkungan adalah “jumlah total dari semua hal eksternal baik hayati maupun non-hayati, kondisi-kondisi, dan pengaruh-pengaruh yang turut menyebabkan perkembangan dan, pada akhirnya, kelangsungan hidup suatu organisme” (Henning, 2002: 11).

Buddhisme meyakini bahwa lingkungan hidup selalu dalam pola prinsip saling ketergantungan atau saling ketergantungan. Prinsip ini menyatakan bahwa tidak ada yang berdiri dari matriks yang lainnya. Semua hal selalu berhubungan satu sama lain. Manusia tidak dapat dipisahkan dari alam sebagai guru pertama dan makhluk hidup di sekitarnya. Manusia bukanlah makhluk yang terisolasi tetapi merupakan bagian dari tubuh alam yang lebih besar. Oleh karena itu, sejak awal manusia, hewan, dan makhluk lain serta sumber daya alam saling bergantung satu sama lain. Singkatnya, semua makhluk hidup dengan satu atau lain dengan cara saling bergantung satu sama lain untuk kelangsungan hidup mereka sendiri (Yamamoto and Kuwahara, 2009; Yamamoto and Kuwahara, 2016; Sukjam, 2020; Samanera, 2023).

Hubungan simbiosis mutualistik semua makhluk hidup menuntut adanya cinta kasih terhadap lingkungan hidup. Istilah cinta kasih (*loving-kindness, metta*) mengacu pada keramahan, persahabatan, niat baik dan minat aktif pada orang lain, atau lebih baik teman sejati yang membutuhkan. Dalam *Karaniyametta Sutta*, pengembangan cinta kasih bersifat universal, ditujukan untuk semua makhluk, entah kecil, besar, kelihatan maupun tak kelihatan.

Semua penjuru harus diliputi dengan sikap penuh kasih ini. Sama seperti kehidupan seseorang yang berharga bagi dirinya sendiri, begitu pula kehidupan orang lain berharga bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, sikap hormat harus dipupuk terhadap semua bentuk kehidupan (Indasara, 2018a: 28).

Cinta antar sesama manusia patut juga dikembangkan dalam hubungan dengan makhluk ciptaan yang lain. Menurut agama Buddha, kehidupan hutan dan tumbuhan memberikan berbagai manfaat bagi kelangsungan hidup manusia dan hewan. Kebutuhan sehari-hari manusia, seperti kertas, kayu, minyak bumi, air, makanan dan sayuran, disediakan oleh hutan. Melalui daun dan akar tanaman, manusia menghasilkan obat-obatan untuk kesehatannya. Lingkungan alam juga melindungi habitat satwa liar, memberikan kesempatan rekreasi bagi manusia, menyediakan makanan untuk hewan, serta menyerap gas memmatikan dan tercemar seperti karbon dioksida (Joyadip, 2013).

Ajaran Buddha memperkuat cinta kasih terhadap lingkungan alam melalui prinsip *ahimsa*, atau ‘tidak melukai’ (*non-injury*). Peter Harvey menjelaskan suatu ketika Sang Buddha menemukan beberapa anak menganiaya ular dengan tongkat, kemudian ia berkata kepada mereka, “Siapapun, yang mencari kebahagiaan sendiri, menyakiti dengan tongkat makhluk yang mencintai kesenangan tidak mendapatkan kebahagiaan di kemudian hari” (Harvey, 2000: 156). Dengan pernyataan ini Sang Buddha menyerukan penerapan prinsip tidak melukai atau tanpa kekerasan kepada semua makhluk hidup, entah manusia, hewan, tumbuhan, pohon dan hutan.

Sang Buddha sendiri sejak awal telah menjadikan hutan sebagai tempat yang ideal untuk meditasi bagi para *bhikkhu*. Praktik pengabdian kepada Buddha juga menunjukkan bahwa para devosan mempresentasikan persembahan mereka di bawah pohon *Bodhi*, sebuah jenis pohon di mana Gotama mencapai Kebuddhaan (*ficus religiosa*). Dengan cara demikian Sang Buddha menghindari kerusakan pada kehidupan benih dan tumbuhan karena “tumbuhan, dan bahkan mineral, mengandung prinsip-prinsip kehidupan atau jiwa (*jīva*) dan merupakan bagian dari lingkaran kelahiran kembali” (Harvey, 2000: 170-175).

Menurut agama Buddha, manusia harus hidup harmonis dengan semua makhluk hidup sesuai dengan prinsip saling ketergantungan, cinta kasih, dan tidak merugikan. “Manusia adalah bagian dari komunitas makhluk hidup di dunia terkondisi di mana penderitaan mewabah. Manusia tidak dilihat sebagai ‘pengurus’ (*steward*) atas hal-hal non-manusiawi, tetapi sebagai sesama bagi makhluk hidup lain yang kurang cerdas. Potensi spiritual manusia berarti bahwa mereka harus lebih dihargai daripada anggota spesies lain, tetapi potensi itu diekspresikan dan ditingkatkan dengan perhatian penuh kasih kepada makhluk apa pun” (Harvey, 2000: 185-186).

Krisis Lingkungan Hidup

Menurut Buddhisme, lingkungan alam selalu berubah secara tetap. Tidak ada yang statis dan stabil di dalam alam semesta. Semua hal dalam dunia senantiasa berada proses yang selalu berubah dan terus bergerak. Perubahan abadi ini terjadi melalui proses isolasi dalam jangka waktu yang lama menurut lima hukum, yaitu hukum fisika, hukum biologis, hukum psikologis, hukum moral, dan hukum sebab akibat. Hukum-hukum ini menunjukkan bahwa manusia dan alam terikat bersama dalam hubungan kausal timbal balik dengan perubahan di satu sisi dan yang secara niscaya membawa perubahan di sisi lain (Indasara, 2018b: 11).

Proses perubahan terus menerus dapat menghasilkan efek positif dan negatif tergantung pada moral manusia. Padmasiri de Silva menjelaskan bahwa menurut etika Buddhisme jika masyarakat menghidupi nilai-nilai yang tidak bermoral maka kehidupan manusia dan alam merosot. Sebaliknya, jika moralitas berkuasa maka kualitas hidup manusia dan alam meningkat. Pandangan etis ini kini tidak lagi mendapat tempat dalam wawasan manusia modern (Silva, 1998).

Manusia modern kini mengadopsi sebuah pandangan salah yang menyatakan bahwa perubahan abadi merupakan sebuah “tindakan korektif terhadap etika keabadian.” Asumsi dasar di balik tindakan korektif ialah bahwa manusia berhak untuk mengintervensi alam sesuai dengan keinginan dan tujuan hidupnya. Paham antropomorfisme ini telah berakar sedemikian rupa sehingga menginfeksi dan mendorong manusia untuk melakukan tindakan eksploitatif terhadap alam karena alam dipandang “sebagai sumber daya yang tak ada habisnya” (Silva, 1998: 43). Tindakan korektif-eksploitatif tersebut kemudian mengarah pada krisis lingkungan hidup yang dengan sendirinya telah menghukum manusia kembali.

Uraian di atas menunjukkan kepada kita dua masalah mendasar dalam krisis lingkungan hidup yang kita hadapi saat ini. Pertama, krisis lingkungan adalah akibat dari kemerosotan moral manusia. Manusia merupakan aktor utama krisis lingkungan. Alasan mengapa kepedulian lingkungan sekarang begitu serius adalah karena manusia ingin mengkonsumsi dan mereproduksi alam lingkungannya secara tak teratur sesuai dengan keinginan dan tujuan hidupnya sendiri. Jadi dasar dari kerusakan lingkungan hidup dan ketidakharmonisan dalam alam semesta adalah egosentrisme dan kesombongan manusia (Silva, 1998: 31). Degradasi moral manusia ini pada dasarnya dimotivasi oleh “keinginan dan keserakahan untuk memaksimalkan keuntungan dan kelebihan dalam satu atau lain cara” (Donde, 2014: 49).

Kedua, krisis lingkungan hidup itu sendiri telah menghukum manusia kembali dan sebagai konsekuensinya manusia menjadi korban dan budak dari perbuatannya sendiri. Kenyataan ini dipandang sebagai buah *karmatik* dalam kehidupan manusia. Menurut

Buddhisme, prinsip “hukum karma” adalah bahwa makhluk-makhluk dilahirkan kembali sesuai dengan sifat dan kualitas tindakan mereka. Dalam kehidupan saat ini, membunuh atau melukai makhluk hidup lain akan membawa penderitaan atau *dukkha* pada manusia. Krisis lingkungan adalah salah satu efek karma yang menghukum manusia, “dimulai dengan aspek konkret dan spesifik dari rasa sakit fisik dan penyakit jasmani, hal ini menggabungkan kesedihan mental, ketidakamanan, konflik dan kecemasan, dan lebih dalam lagi, ketidakpuasan, ketidakharmonisan dan kekosongan” (Silva, 1998: 33).

Oleh karena itu Indasara mengutip *Cakkavattisīhanāda Sutta* dari Dīgha Nikāya, menjelaskan bahwa degradasi terhadap lingkungan hidup tak lain adalah degradasi terhadap manusia itu sendiri: “Jika lingkungan hidup dirusakkan atau direndahkan, orang tidak dapat bertahan atau memiliki kehidupan yang berkualitas. Dengan menyalahgunakan lingkungan hidup, orang-orang melecehkan diri mereka sendiri dan keturunan mereka serta generasi masa depan dari semua kehidupan” (Indasara, 2018a: 11).

Akar Penyebab Krisis Lingkungan Hidup

Para ahli etika telah berusaha mendiagnosis kerusakan lingkungan dan sampai pada kesimpulan bahwa akar penyebabnya adalah paham filsafat antropomorfisme yang berakar dalam cara pandang manusia terhadap alam (Duc, 2017; Keraf, 2022; Droz, 2022; Attfield, 2011). Secara etimologis, istilah antropomorfisme berasal dari Bahasa Yunani *antropos* yang berarti manusia dan *kentron* yang berarti pusat. “Persepsi umum antroposentrisme menyatakan bahwa manusia adalah satu-satunya entitas yang memiliki nilai atau nilai tertinggi sehingga kepentingannya harus dilayani tanpa memandang kepentingan lainnya. Antroposentrisme dapat dikatakan menyiratkan sentralitas kepentingan manusia agar segala sesuatunya terpenuhi. mempunyai nilai instrumental” (Sahni, 2008: 80). A. Sonny Keraf menjelaskan dengan singkat dan padat paham etika ini sebagai berikut:

Antropomorfisme adalah teori etika yang memandang manusia sebagai pusat dari system alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hanya manusia yang mempunyai nilai dan mendapat perhatian. Segala sesuatu yang lain di alam semesta ini hanya akan mendapat nilai dan perhatian sejauh menunjang dan demi kepentingan manusia. Oleh karena itu, alam pun dilihat sebagai hanya sebagai obyek, alat dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia. Alam hanya alat bagi pencapaian tujuan manusia. Alam tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri (Keraf, 2002: 33).

Etika antropomorfistik dituduh sebagai salah satu penyebab utama krisis lingkungan hidup karena bersifat instrumentalistik dan egostik. Instrumentalistik dalam pengertian alam hanya dipandang sebagai alat untuk mencapai kepentingan manusia (Keraf, 2002: 34). Etika ini

juga bersifat egoistik karena hanya mengutamakan kepentingan manusia (Keraf, 2002: 35). Kedua kekurangan tersebut membuat etika antropomorfisme “terlalu sempit dan dangkal dalam memandang keseluruhan ekosistem, termasuk manusia dan tempatnya dalam alam semesta” (Keraf, 2002: 35; Sahni, 2008: 84).

Menurut Anthony Le Duc, dari sudut pandang etika Buddhisme, tuduhan terhadap antropomorfisme itu masih berada pada tataran fenomena eksternal dan tidak mengena akar terdalam krisis lingkungan hidup. Pertanyaan mendasar etika Buddhisme yang segera muncul ialah “Dari mana datangnya kecenderungan antroposentris yang negatif?” (Duc, 2017: 128). Diagnosis etika Buddhisme tentang krisis lingkungan hidup tidak didasarkan pada pengamatan fenomenal atau pengalaman empiris tetapi pada ajaran Sang Buddha mengenai motivasi manusia yang mengarah pada kecenderungan tindakan destruktif baik pada tataran pribadi maupun sosial. Sang Buddha membagi keadaan manusia menjadi dua keadaan, yaitu baik atau bermanfaat (*kuasala*) dan jahat, tidak bermanfaat (*akusala*). “Akar penyebab dari kondisi-kondisi yang tidak bermanfaat adalah keserakahan (*lobha*), kebencian (*dosa*), dan khayalan (*moha*), sedangkan akar penyebab dari kondisi-kondisi bermanfaat adalah tanpa keserakahan, tanpa kebencian, dan tanpa delusi” (Duc, 2017: 130). Anthony Le Duc menjelaskan ketiga akar penyebab krisis saling terkait dalam diri manusia.

Ketiga akar ini tidak berdiri sendiri-sendiri dalam kesadaran manusia, melainkan saling terkait satu sama lain dan seringkali menjadi kekuatan pendorong satu sama lain. Misalnya, seseorang yang menderita keserakahan mungkin juga menyimpan kebencian yang besar ketika dia tidak mampu mencapai hal-hal yang diinginkannya karena adanya hambatan nyata atau yang dirasakan dari orang lain. Dengan cara yang sama, khayalan adalah landasan di mana keserakahan dan kebencian berdiri karena khayalan membuat seseorang percaya bahwa seseorang seharusnya menginginkan dan membutuhkan sesuatu, atau bahwa seseorang seharusnya membenci orang-orang atau hal-hal tertentu. Karena itulah *Dhammapada* menyatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat menyebabkan keterjeratan selain jaring khayalan. Barangkali khayalan terbesar, menurut agama Buddha, adalah keyakinan salah pada diri atau ego yang menyebabkan seseorang melakukan berbagai hal demi ego tersebut – membanggunya, melindunginya dari bahaya, dan mempertahankannya dari serangan, dan sebagainya (Duc, 2017: 131).

Lalu apa akar penyebab kemerosotan moral manusia terhadap lingkungan hidup menurut etika Buddhisme? Penyebab krisis lingkungan hidup adalah kejahatan atau tindakan-tindakan tidak bermoral atau tidak bermanfaat (*akusala*) seperti keserakahan, kebencian, dan khayalan. Keserakahan adalah keadaan nafsu, keserakahan, pencarian ketenaran dan tatanan dogmatis yang melekat dalam setiap ide. Keserakahan terus-menerus berorientasi pada aneksasi objek seperti monyet.

Lily de Silva menguraikan bahwa dalam *Aggañña Sutta* diceritakan tentang munculnya makhluk-makhluk purba yang bercahaya, hidup dari kegembiraan, dan memiliki kekuatan untuk berkelana di angkasa. Akan tetapi karena keserakahan, makhluk-makhluk tersebut secara perlahan kehilangan baik cahaya, kegembiraan maupun kekuatan untuk bergerak di langit. Degradasi moral ini kemudian berdampak pada alam, sebagaimana dikutip berikut ini (Silva, 2005).

Pada saat itu seluruh bumi ditutupi oleh zat wangi yang sangat beraroma mirip mentega. Ketika makhluk-makhluk mulai mengonsumsi zat ini dengan semakin rakus, di satu sisi tubuh halus mereka menjadi semakin kasar. Di sisi lain, zat beraroma itu sendiri mulai berkurang secara bertahap. Dengan pemadatan tubuh, perbedaan bentuk muncul; beberapa indah sementara yang lain jelek. Kemudian kesombongan terwujud dalam diri makhluk-makhluk itu, dan makhluk-makhluk cantik mulai memandang rendah makhluk-makhluk lain. Sebagai akibat dari kecacatan moral ini, substansi tanah yang lezat dan dapat dimakan hilang sama sekali. Sebagai gantinya muncullah jamur yang dapat dimakan dan kemudian jenis tanaman menjalar lainnya yang dapat dimakan. Pada makhluk yang hidup darinya, diferensiasi jenis kelamin menjadi nyata dan metode kelahiran spontan yang lama digantikan oleh reproduksi seksual.

Padi yang tumbuh sendiri muncul di bumi dan karena kemalasan mengumpulkan setiap makanan, manusia menjadi terbiasa menimbun makanan. Akibat kebiasaan menimbun ini, laju pertumbuhan pangan tidak mampu mengimbangi laju permintaan. Tanah Therupon harus dibagi di antara keluarga-keluarga. Setelah kepemilikan pribadi atas tanah menjadi hal biasa, orang-orang yang lebih rakus mulai merampok tanah orang lain. Ketika terdeteksi, mereka menyangkal bahwa mereka telah mencuri. Dengan demikian, melalui keserakahan, kejahatan seperti mencuri dan berbohong menjadi nyata di masyarakat. Untuk mengekang pelaku kejahatan dan menghukum mereka, seorang raja dipilih oleh rakyat dan dengan demikian masyarakat sederhana yang semula menjadi jauh lebih kompleks dan rumit... Kekayaan bumi berkurang dan padi yang tumbuh sendiri pun lenyap. Manusia harus menggarap tanah dan menanam padi untuk makanan. Butir beras ini dibungkus dengan sekam; perlu dibersihkan sebelum dikonsumsi.

Cerita di atas menegaskan keyakinan agama Buddha bahwa “meskipun perubahan merupakan faktor yang melekat pada alam, kemerosotan moral manusia mempercepat proses perubahan dan membawa perubahan yang merugikan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia” (Silva, 2005). Akar dari kerusakan itu tak lain adalah keserakahan. Tim Buddha Wacana secara singkat dan jelas mendeskripsikan akibat keserakahan bagi manusia sebagai berikut:

Keserakahan merupakan kekotoran batin yang ada dalam diri manusia yang timbul karena adanya keinginan untuk memiliki terhadap sesuatu secara berlebihan. Keserakahan ini jelas akan mengakibatkan penderitaan bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Orang yang dikuasai oleh keserakahan akan melakukan berbagai cara untuk memenuhinya, misalnya: membunuh,

merampas, menipu, dan mengambil barang yang bukan menjadi hak milik (Tim Buddha Wacana, 2021).

Dalam konteks krisis lingkungan hidup, keserakahan membawa malapetaka karena manusia secara berlebihan ingin mendapatkan segala-galanya demi dirinya sendiri sehingga menyebabkan eksploitasi sumber daya alam tiada henti. Philip Cafaro, sebagaimana dikutip oleh Anthony Le Duc mengidentifikasi tiga cara keserakahan menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan (Duc, 2013).

Pertama, standar lingkungan dilanggar ketika dunia usaha menjadikan keserakahan sebagai motivasi pendorongnya. Untuk memaksimalkan keuntungan, dunia usaha dapat dengan mudah menolak mengeluarkan uang untuk membiayai metode dan instrumen yang dapat menghilangkan bahan kimia dan limbah yang diproduksi oleh pabrik mereka secara aman agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi perusahaan.

Kedua, keserakahan juga dapat merusak demokrasi. Hal ini paling jelas terlihat ketika para pemimpin pemerintah melakukan korupsi, seperti membuat kebijakan dan undang-undang yang memberikan keistimewaan kepada perusahaan yang menghasilkan uang dengan cara yang berbahaya bagi lingkungan. Pemimpin pemerintah dan pembuat kebijakan dapat memberikan izin kepada perusahaan pertambangan untuk membangun di atas cagar alam yang masih asli atau untuk membangun kompleks industri besar di dekat danau dan sungai yang masih digunakan oleh penduduk lokal untuk kehidupan sehari-hari. Jika para pemimpin pemerintah berfokus pada keuntungan pribadi daripada peningkatan kesejahteraan rakyat atau lingkungan hidup, transparansi yang diperlukan untuk sistem demokrasi akan terganggu.

Ketiga, keserakahan berfungsi sebagai katalisator untuk konsumsi berlebihan. Meskipun konsumsi berlebihan sudah ada sejak zaman prasejarah, itu menjadi lebih intens dan lebih cepat pada abad ke-20 karena banyak hal, seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan perubahan besar dalam nilai-nilai sosial dan spiritual. Bisnis berusaha memaksimalkan keuntungan mereka di era konsumerisme dengan menjual sebanyak mungkin barang, mendorong dan memenuhi keinginan orang untuk memiliki banyak barang, bahkan yang tidak penting bagi kehidupan mereka.

Kebencian juga merupakan penyebab krisis lingkungan. Kebencian adalah keadaan pikiran di mana ada sedikit ketidaknyamanan, kemarahan, dan kebencian yang membara. Ketika individu dan kelompok menggunakan strategi agresif atau ketika lembaga pemerintah menerapkan kebijakan agresif untuk mencapai keuntungan ekonomi yang egois, dapat terjadi kebencian yang merusak lingkungan. Untuk mendapatkan kontrol atau monopoli atas sumber

daya alam yang akan dieksploitasi untuk keuntungan ekonomi, suatu negara atau organisasi dapat menggunakan pendekatan imperialistik atau opresif. Karena seluruh ladang minyak akan habis dan hutan yang luas akan menjadi gundul, para eksekutif perusahaan dan pejabat pemerintah akan dapat menghasilkan banyak uang. Kebencian dalam bentuk militan jelas, tetapi ada juga bentuk kebencian yang lebih halus yang sulit untuk diidentifikasi (Duc, 2013).

Sikap apatis adalah contoh kebencian yang halus. Meskipun masyarakat diberitahu tentang bahaya lingkungan yang dapat dilihat dari cepatnya hilangnya spesies, penggundulan hutan, dan polusi sungai dan udara, mereka hanya menunjukkan kekhawatiran yang dangkal, tetapi tidak berbuat apa-apa untuk mengubah perilaku mereka yang menyebabkan kerusakan ini. Seperti halnya kebencian militan, sikap apatis dapat dianggap sebagai jenis kebencian pasif yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan secara kolektif. Kelalaian atau kurangnya kepedulian juga dapat dianggap sebagai manifestasi kebencian karena sikap ini menunjukkan watak yang buruk terhadap orang lain. Meskipun militansi mungkin hanya terbatas pada individu, kelompok, organisasi, atau pemerintah yang memiliki reputasi buruk, sebagian besar orang apatis, lalai, dan tidak peduli. Hal ini membuat semua orang rentan untuk disalahkan ketika menentukan akar penyebab krisis ekologi (Duc, 2013).

Akar penyebab krisis lingkungan hidup yang terakhir adalah khayalan atau fantasi. Dalam Buddhisme istilah ini mengacu pada misorientasi spiritual atau keadaan pikiran yang panik, salah, dan ragu tentang masalah moral dan spiritual. Ittademaliye Indasara menjelaskan “ketika umat manusia kehilangan moral karena keserakahan, kelaparan adalah akibat yang wajar; ketika kemerosotan moral disebabkan oleh ketidaktahuan, epidemi adalah hasil yang tak terhindarkan; ketika kebencian adalah kekuatan yang mendemoralisasi, kekerasan yang meluas adalah hasil akhirnya” (Indasara, 2018b: 12).

Anthony Le Duc menyatakan bahwa delusi dalam perspektif Buddhis berfungsi sebagai katalisator yang kuat untuk krisis lingkungan karena merupakan fondasi bagi dua kondisi negatif lainnya. Ini adalah kondisi di mana orang percaya bahwa hal-hal yang tidak kekal, seperti status sosial dan harta benda, dapat memberi mereka kebahagiaan dan kepuasan. Ini kadang-kadang disebut sebagai ketidaktahuan atau pandangan salah. Berkat khayalan ini, kita terus mengumpulkan dan mencari tanpa pernah mendapatkan apa yang kita inginkan, dan kita terus berjuang. Selain itu, secara sistematis, khayalan mendorong orang untuk berpikir bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan riil adalah ukuran kebaikan nasional, bahwa produksi dan konsumsi yang lebih tinggi menunjukkan kesejahteraan yang lebih baik, dan bahwa pertumbuhan PDB yang berkelanjutan lebih penting daripada keberlanjutan (Duc, 2013).

Lebih lanjut Anthony Le Duc menjelaskan bahwa dalam konteks krisis ekologi, delusi yang disebabkan oleh pandangan yang salah juga dapat muncul dalam berbagai cara. Misalnya, karena menyerap informasi sepihak dari lembaga pemerintah atau kelompok kepentingan, individu dan kelompok tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang suatu masalah atau salah memahaminya. Ada kemungkinan bahwa ketidaktahuan disebabkan oleh pengingkaran terhadap pentingnya masalah yang didasarkan pada pengalaman empiris yang sederhana tanpa mempertimbangkan fakta ilmiah yang valid dan konsensus para ahli. Gagasan ideologis yang mendukung gagasan bahwa manusia dapat memiliki dominasi absolut atas alam dapat menyebabkan khayalan. Demikian pula, khayalan dapat berupa gagasan bahwa masalah akan diselesaikan jika para ilmuwan dapat menemukan solusi cerdas. Meskipun ilmu pengetahuan memiliki peran penting dalam memperbaiki keadaan, solusi ilmiah hanyalah sebagian dari rencana tindakan yang lebih besar. Terakhir, khayalan juga dapat berasal dari gagasan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk mencari planet lain untuk ditinggali jika semuanya gagal (Duc, 2013).

Etika Buddhisme tentang Sostenabilitas Lingkungan Hidup berdasarkan *Pañca sila*

Etika lingkungan hidup pada dasarnya membahas tentang tindakan manusia yang tepat mengenai planet bumi. Istilah etika berasal dari kata Bahasa Yunani “ethos” artinya “kebiasaan” dan merujuk pada tindakan-tindakan dan nilai-nilai yang menuntun perilaku manusia. Dalam pengertian filosofis, etika merupakan evaluasi rasional terhadap apa yang dikatakan oleh kebiasaan-kebiasaan kepada kita tentang bagaimana kita seharusnya hidup. Dengan demikian, etika lingkungan hidup menekankan bagaimana manusia seharusnya hidup secara harmonis dengan lingkungannya (Phorst, 2012: 139; Kundu, 2021: 5426).

Sebagai suatu bidang filsafat moral, etika lingkungan hidup pada umumnya membangun argumentasi dan filosofinya dengan fokus pada tanggung jawab etis individu, yaitu bagaimana sebaiknya seseorang bertindak untuk mengurangi kerusakan lingkungan hidup selaras dengan alam, dan menikmati kualitas hidup yang memuaskan sekaligus mewujudkan kebajikan mengenai lingkungan hidup (Kaza, 2018: 439). Singkatnya, “Etika lingkungan berkaitan dengan hubungan moral antara manusia dan alam. Prinsip-prinsip etika yang mengatur hubungan tersebut menentukan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab kita sehubungan dengan lingkungan alam bumi dan semua hewan dan tumbuhan yang menghuninya” (Taylor, 1986: 3).

Menurut Simon P. James, penjelasan mengenai lingkungan hidup di atas atas salah satu cara sejalan dengan pandangan dunia dari Buddhisme awal dalam tiga arti. Pertama, pandangan dunia Buddhisme awal bersifat *naturalistik*, artinya segala sesuatu dianggap sebagai sesuatu yang alamiah, bahkan para dewa pun dianggap terikat dalam siklus keahiran, kematian dan

kelahiran kembali. Kedua, pandangan dunia Buddhisme awal bersifat *holistik*, dalam arti segala sesuatu dalam dunia fenomenal berada dalam hubungan dengan berbagai kondisi yang ada, dan bersifat kosong pada hakikatnya. Ketiga, pandangan dunia BUddhisme awal bersifat dinamis, dalam arti segala sesuatu dalam dunia fenomenal bersifat tidak kekal, senantiasa bergerak dan berubah, tidak statis (James, 2013: 602).

Untuk mengatasi masalah lingkungan hidup, etika Buddhisme menuntut keterlibatan tiga kemampuan dasar manusia, yaitu pikiran, pemahaman, dan tindakan. Manusia harus memiliki pikiran positif terhadap alam, yaitu kemampuan dan keinginan untuk mencintai, menghargai serta menjaga lingkungan hidup sebagai bagian integral dari dirinya sendiri. Pikiran positif terhadap alam memungkinkan manusia untuk tidak mengeksploitasi dan menaklukkan alam. Pikiran positif terhadap alam dapat dilatih melalui permenungan atau *samadhi*. Pikiran positif harus ditopang dengan pemahaman yang benar tentang sebab dan akibat persoalan lingkungan hidup dan tatanan alam serta sistem ekologi, yaitu bahwa manusia dan semua anasir dalam alam merupakan satu kesatuan ekosistem yang bergantung satu sama lain. Untuk itu dibutuhkan kebijaksanaan (*panya*) untuk menjaga agar manusia tetap berada pada pemikiran dan tindakan yang benar terhadap alam. Akhirnya, Buddhisme juga menganjurkan tindakan yang benar terhadap alam melalui aturan internal (*sila*) dan aturan eksternal (*Vinaya*). Aturan internal adalah niat sadar yang timbul dari keyakinan agama dan perilaku mkoral manusia terhadap alam sedangkan aturan eksternal adalah aturan-aturan yang melarang Tindakan tidak patut terhadap alam. Ketiga unsur dasar ini terkait dan mendukung satu sama lain dan menjadi solusi komprehensif untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup (Thathong, 2012: 5064).

Dijelaskan oleh Thathong:

Sekalipun masyarakat memahami sebab dan akibat dari permasalahan lingkungan hidup, mereka tidak akan mengubah perilakunya yang merugikan lingkungan jika pikirannya tidak mempunyai keinginan untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, *panya* harus didukung dan ditingkatkan dengan *sila* dan *samadhi* (Thathong, 2012: 5064).

Perhatian etika Buddhisme tentang lingkungan hidup lahir dari keinginan mendalam Sang Buddha dalam memajukan kebaikan dan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan dengan menganjurkan sikap non-agresif dan sikap ramah terhadap alam (Prakash, 2018: 219). Dalam *Sigalovada Sutta*, Sang Buddha mengarpakan agar “manusia dapat memanfaatkan alam secara sah sehingga ia dapat bangkit dari alam dan menyadari potensi spiritual bawaannya” (Indasara, 2018b: 21). Ia kemudian mengembangkan kode etik dan moralitas praktis yang dikodifikasikan dalam lima ajaran kebenaran atau *Pañca sila* (Lima ajaran moral).

Sila pertama adalah tidak mencederai (*non-injury*). Sila ini mengesampingkan pembunuhan yang disengaja (*intentional*) dan tidak disengaja (*non-intentional*), langsung dan tidak langsung dari setiap makhluk hidup, manusia atau sebaliknya. Sila ini memperluas cakupannya tidak hanya untuk manusia tetapi juga untuk semua makhluk dalam siklus kelahiran kembali yang sama dan dalam pengalaman berbagai jenis penderitaan. Semangat ajaran ini diekspresikan sebagai “larangan membunuh.” Dikatakan, “Mengesampingkan kekerasan sehubungan dengan semua makhluk, baik yang diam maupun yang bergerak... Seseorang tidak boleh membunuh makhluk hidup, atau menyebabkan pembunuhan, atau menyetujui pembunuhan orang lain” (Harvey, 2000: 69). Menurut agama Buddha, larangan membunuh dipahami sebagai tindakan tanpa kekerasan.

Tanpa kekerasan tidak hanya berarti tidak adanya kekerasan, tetapi juga adanya perhatian, niat baik, perhatian, dan kasih terhadap makhluk lain. Tanpa kekerasan menunjukkan dirinya dalam welas asih dan rasa penghargaan tentang kebahagiaan dan kesejahteraan orang lain (Henning, 2002: 37).

Dalam konteks lingkungan, penghilangan habitat alami dari satwa liar dan makhluk hidup lainnya akan merusak atau merugikan makhluk tersebut. Pencemaran perairan akan mengakibatkan kematian atau penderitaan ikan dan kehidupan akuatik lainnya, termasuk bentuk kehidupan darat lainnya yang memakan kehidupan air. Juga, dengan tidak mengambil tindakan untuk mencegah tindakan tidak langsung ini, seseorang terlibat dengan non-tindakan ketika kemungkinan ada untuk menghentikan pembunuhan makhluk hidup lainnya (Henning, 2002: 38).

Sila kedua adalah menghindari pencurian dan kecurangan. Ajaran ini melarang tindakan pencurian apa pun, yang merupakan tindakan merampas properti orang lain. Dalam perspektif Buddhisme, “pencurian dipandang lebih buruk menurut nilai dari apa yang dicuri, tetapi juga menurut keutamaan orang yang dicuri,” termasuk “penipuan, kecurangan, pemalsuan, dan penyangkalan palsu bahwa seseorang berhutang kepada seseorang” (Harvey, 2000: 70).

Terkait dengan lingkungan, Indasara menjelaskan bahwa “perkembangan, pemasaran dan konsumsi yang tidak bijaksana, tidak pantas, dan tidak terkendali, mencuri dari semua generasi kehidupan sekarang dan yang akan datang.” Pembalakan liar, penangkapan ikan ilegal, dan semua tindakan ilegal, nepotisme dan korupsi, dapat dilihat sebagai bentuk “mencuri dari yang belum lahir sambil mengabaikan hak-hak mereka dan kebutuhan untuk hidup di generasi sekarang dan masa depan dari semua kehidupan” (Indasara, 2018b: 23).

Buddhisme menganjurkan kita untuk melihat hutan sebagai anugerah bagi semua makhluk hidup. “Jika kita menebang pohon itu, kita mengambil hadiah ini dari makhluk lain yang mungkin datang dengan cara yang sama... Melihat pohon hanya dalam kaitannya dengan

kegunaannya untuk mendapatkan kekayaan materi adalah tindakan yang egois dan menyesatkan karena mencuri dari makhluk lain” (Henning, 2002: 39). Oleh karena itu, manusia harus memupuk cinta kasih terhadap semua makhluk sebagaimana nyawanya sendiri berharga untuk dirinya sendiri.

Sila ketiga adalah menghindari perilaku seksual yang salah. Ajaran ini pada dasarnya melarang penderitaan orang lain yang disebabkan oleh perilaku seksual seseorang. Dalam sudut pandang agama Buddha, perbuatan salah ini adalah ekspresi keserakahan. Dalam pengertian ini, sila ketiga tidak hanya berhubungan dengan tidak berhubungan seks dengan istri atau pasangan orang lain, tetapi juga berhubungan dengan wanita yang bertunangan atau yang masih dilindungi oleh kerabat mana pun. Aturan moralitas tersebut sebagian menghindari bahaya bagi orang lain, termasuk pemerkosaan, inses, dan hubungan seksual dengan pelacur atau prostitusi (Harvey, 2000: 71-72).

Menurut Henning, sila ketiga moralitas terhadap perilaku seksual harus diperluas pada kompleksitas eksploitasi lingkungan hidup yang merupakan bentuk perkosaan dan kekerasan.

Alam sedang diperkosa, termasuk perusakan hutan tropis yang cepat dan nyata... dengan sedikit pertimbangan terhadap sifat rapuh dan non-regeneratifnya. Keserakahan, keinginan, ketidaktahuan, dan keengganan adalah kekuatan dasar untuk eksploitasi. [Lingkungan hidup bukanlah] objek dari perilaku egois dan keinginan seseorang karena kesadaran bahwa menggunakan lingkungan untuk memuaskan keserakahan hanya akan mengakibatkan penderitaan (Henning, 2002: 41).

Sila keempat adalah menghindari kebohongan dan bentuk ucapan salah lainnya. Menurut Buddhisme, “berbohong harus dihindari tidak hanya karena sering merugikan orang lain, tetapi karena itu bertentangan dengan nilai Buddhis dalam mencari kebenaran, melihat sesuatu ‘sebagaimana adanya’. Semakin banyak orang menipu orang lain, semakin besar kemungkinan mereka untuk menipu diri sendiri; dengan demikian, delusi dan ketidaktahuan spiritual mereka meningkat. Lebih jauh, satu kebohongan sering mengarah pada ‘kebutuhan’ orang lain untuk menutupinya, yang mengarah pada kekacauan di mana pembohong selalu harus ‘menjaga punggungnya’, semakin memalsukan apa yang dia coba lindungi, sehingga menjadi semakin ‘tidak nyata’” (Harvey, 2000: 75).

Dalam kaitannya dengan lingkungan, seringkali sektor publik dan swasta yang terlibat dalam gerakan lingkungan hanya memberikan basa-basi pada nilai dan pertimbangan konservasi dan ekologi. Akibatnya, kepercayaan dan martabat publik dilanggar dan publik tidak dapat berpartisipasi secara efektif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka karena kurangnya informasi dan alternatif penting. Dengan demikian, mereka kehilangan hak asasi manusia untuk menentukan masa depan mereka sendiri (Henning 2002:

42). Agama Buddha menuntut untuk memperluas sikap moderat seseorang dalam berbicara dengan menggunakan “kata-kata dengan bijak, untuk menginformasikan, membantu atau mengungkapkan kebaikan kepada orang lain, tidak hanya demi membuka mulut seseorang” (Harvey, 2000: 76).

Sila kelima adalah ketenangan hati (*sobriety*). Sila ini dapat dilihat sebagai bantuan untuk “perhatian benar,” yaitu kesadaran lengkap dari semua gerakan yang terjadi di dalam dan di luar diri, baik di dalam tubuh, pikiran dan kesadaran, dan di dunia luar. Menurut V. Jayaram “inti dari perhatian benar adalah menjadi sadar tanpa terikat atau menghakimi.” Hal ini menuntut manusia untuk hati-hati mengingat hubungannya dengan hal-hal di dunia luar, dan menerima hal-hal sebagaimana adanya, menjelaskan banyak kesalahpahaman tentang lingkungan dan melampaui keserakahannya akan sumber alam (Jayaram, 2000).

Dalam konteks lingkungan, aturan ini mengacu pada menahan diri dari mengkonsumsi zat yang memabukkan seperti alkohol dan obat-obatan serta menghindari keterlibatan dalam produksi dan perdagangannya, termasuk efek langsung dan jangka panjang dari zat yang memabukkan.

Tekanan alkohol dan obat-obatan ini dapat berkontribusi pada tindakan ilegal dan eksploitasi berlebihan untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan untuk penggunaan berkelanjutan serta biaya hidup rutin. Penggunaan obat-obatan narkotika tidak hanya terbukti berbahaya bagi kesehatan fisik dan mental konsumen dan kerabatnya, tetapi juga menyebabkan kerusakan besar pada alam karena produksinya (Henning, 2002: 44).

Dalam *Siga-cinta-dha Sutta*, Sang Buddha berkata bahwa “melanggar sila kelima menyebabkan enam bahaya: pemborosan uang saat ini, pertengkaran yang meningkat, kewajiban terhadap penyakit, kehilangan nama baik, pemaparan yang tidak senonoh terhadap seseorang, dan melemahnya kebijaksanaan seseorang” (Harvey, 2000: 77).

KESIMPULAN

Degradasi moral manusia berdampak pada lingkungan luar dan dengan sendirinya telah menghukum manusia kembali. Pernyataan ini, pertama-tama, merujuk pada manusia sebagai aktor utama krisis lingkungan. Krisis lingkungan adalah akibat dari egosentrisme dan kesombongan manusia untuk mengkonsumsi dan mereproduksi alam. Eksploitasi lingkungan yang berlebihan kemudian menciptakan situasi dimana manusia menjadi korban dan budak dari perbuatannya sendiri. Fakta ini bisa dilihat sebagai buah karma dalam kehidupan manusia. Akar penyebab kemerosotan moral manusia terhadap lingkungan bersumber dari dan dimotivasi oleh keserakahan (*lobha*), kebencian (*dosa*) atau delusi (*moha*).

Etika Buddhisme menganjurkan sikap non-agresif yang lembut dalam semua pencarian manusia. Pedoman etika dasar diekspresikan melalui “Lima Sila” (*Pañca sila*): tidak membunuh

mahluk hidup (tidak menyakiti), tidak mengambil apa yang tidak diberikan secara bebas oleh pemiliknya (mencuri), tidak melakukan perbuatan seksual yang tidak pantas, tidak berbohong, dan tidak mengkonsumsi minuman keras yang menyebabkan kecerobohan.

Krisis lingkungan hidup adalah krisis rumah kita bersama, dan kini krisis tersebut telah memasuki “Rumah Bersama Indonesia Raya”. Dalam lingkup Ibu Pertiwi, Greenpeace Indonesia mencatat bahwa dari tahun 2015-2019 total hutan Indonesia yang terbakar sebesar 3.403.000 hektar akibat tindakan beberapa korporasi besar. Selain itu, kondisi “[t]erumbu karang sebagai tempat bernaung biota laut” berada pada level 35.15% atau “masuk dalam kategori buruk” (Greenpeace Indonesia, 2000). Sementara itu, merujuk pada data Auriga Nusantara, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat bahwa dalam dua dekade terakhir telah terjadi deforestasi di Papua seluas 663.443 hektar dimana 71% diantaranya terjadi tahun 2011-2019. Hal ini merupakan akibat dari pembukaan perkebunan sawit sebesar 339.274 hektar walau hanya 194 hektar yang ditanami sawit sedangkan sisanya mengalami kerusakan. Lebih dari itu, merujuk pada data IPBES 2018, WALHI mencatat bahwa Indonesia kehilangan hutan seluas 680 hektar setiap tahun dan dari 105 sungai yang ada di Indonesia, 101 diantaranya mengalami pencemaran sedang hingga berat. Akibatnya, jumlah korban jiwa tak tak berdosa meningkat signifikan. Misalnya, pada tahun 2017 terdapat 3.49 juta korban dan meningkat menjadi 9.88 juta jiwa pada tahun 2018 (WALHI, 2021).

Data di atas sangat mencemaskan kita sebagai anak bangsa. Tetapi lebih dari itu tersirat sebuah imperatif etis bagi seluruh anak bangsa untuk kembali kepada nilai-nilai moral yang terdapat dalam dasar Negara Pancasila untuk menyelamatkan Rumah Bersama, Republik Indonesia. Kita perlu merefleksikan kembali hubungan kita dengan Tuhan, menyatu membangun hidup bersama tanpa egoism sempit, membuat kesepakatan politik dan melaksanakannya secara konsisten demi menyelamatkan bumi Indonesia serta semua anasir di dalamnya. Akhirnya, kita perlu menyatakan sikap yang adil bagi sesame dan semua mahluk hidup lain yang ada dalam alam Indonesia.

Singkatnya, sebagaimana ditegaskan Hyun Min Choi, “Untuk menyelesaikan masalah krisis lingkungan, kita perlu mengubah persepsi kita tentang alam dan manusia dan merefleksikan secara mendalam pemahaman kita tentang dimensi fundamentalnya. Perusakan lingkungan pada saat itu menunjukkan adanya distorsi persepsi terhadap alam dan distorsi persepsi dalam seluruh hubungan kita. Terkait dengan keterhubungan semua mahluk, kita tidak hanya telah memutarbalikkan hubungan antara manusia dan alam, namun juga hubungan antara kita sebagai manusia, dan antara manusia dengan Tuhan. Krisis ekologis dengan demikian

mendorong kita untuk merenungkan semua hubungan kita” (Choi, 2009: 160) baik dengan Tuhan, sesama, dan alam semesta.

DAFTAR PUSTAKA

- Attfield, Robin. (2011). “Beyond Anthromorphism.” *Royal Institute of Philosophy Supplement* 69: 29-46. DOI: <https://doi.org/10.1017/S1358246111000191>.
- Bayuseto, Agung. (2023). “Eco-Dhamma: Buddhist Philosophies for Environmental Stewardship in Sukabumi, Indonesia.” *Smaratungga: Journal of Education and Buddhist Studies* 3, No. 2: 117-132. <https://doi.org/10.53417/sjeb.v3i2.119>.
- Buddhistdoor International Dhammadipa Samanera (Joyadip). (2013). “Buddhist Perspective on Ecological Crisis and Individual Social Responsibility.” <https://www.buddhistdoor.net/features/buddhist-perspective-on-ecological-crisis-and-individual-social-responsibility> (diakses 15 Mei 2024).
- Choi, Hyun Min. (2009). “Interreligious Dialogue toward Overcoming the Eco-crisis.” *International Journal of Buddhist Thought & Culture* February 12: 157-192. <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=6f5566a1a8c4ca8bacdbd7834549684d303a98a5>.
- Donde, Subhash Bhimrao. (2014). “Buddhist Perspectives on Environmental Conservation and Sustainable Development.” *Journal of Contemporary Research*: 49-52.
- Dorzhighushaeva, Oyuna V., and Kiplyuks, Aryana V. (2020). “Environmental Ethics of Buddhism.” *International Journal of Environmental Science and Development* 11, No. 3: 154-158. Doi: 10.18178/ijesd.2020.11.3.1243.
- Droz, Lařna. (2022). “Anthropocentrism as the Scapegoat of the Environmental Crisis: A Review.” *Ethics in Science and Environmental Politics* 22: 25-49. <https://doi.org/10.3354/ese00200>.
- Duc. Anthony Le. (2017). “Buddhist Communication of the True Roots of the Ecological Crisis.” *Religion and Social Communication* 15, No. 2: 125-141. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3175338.
- _____. (2013). “Greed, Hatred and Delusion: The Buddhist Diagnosis of the Root Cause of the Ecological Crisis.” <https://asianresearchcenter.org/blog/other-publications/le-duc-greed-hatred-and-delusion-the-buddhist-diagnosis-of-the-root-cause-of-the-ecological-crisis>.
- Greenpeace Indonesia. (2020). “Tantangan Kita Bersama di Tahun 2020.” https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/4544/tantangan-kita-bersama-di-tahun-2020/?utm_term=&utm_campaign=GPTH-Drive+Traffic+:+Dynamic+Ad&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=2641717568&hsa_cam=183163_00486&hsa_grp=136380207810&hsa_ad=621355663851&hsa_src=g&hsa_tgt=dsa-1749761317657&hsa_kw=&hsa_mt=&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIn8PXwtuThgMVAQ-DAx3ovQW3EAAAYASAAEgKZDvD_BwE (diakses 17 Mei 2024).
- Gross, Rita M. (1997). “Toward a Buddhist Environmental Ethics.” *Journal of the American Academy of Religion* 65, no. 2: 333-353.
- Harvey, Peter. (2000). *An Introduction to Buddhist Ethics: Foundations, Values, and Issues*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Henning, Daniel H. (2002). *A Manual for Buddhism and Deep Ecology*. Bloomington: First Book Library.

- Indasara, Ittadembaliye. (2018a). "Evolution and Nature of the Society." *Class Lecture*. Manila: Ateneo de Manila University.
- _____. (2018b). "Buddhist Concept of Flora and Fauna Conservation." *Class Lecture*. Manila: Ateneo de Manila University.
- James, Simon P. (2013). "Buddhism and Environmental Ethics" dalam *A Companion to Buddhist Philosophy*, First Edition. Edited by Steven M. Emmanuel. Oxford: Wiley-Blackwell: 601-612.
- Jayaram, V. (2000). "The Buddha's Teaching on Right Mindfulness." <https://www.hinduwebsite.com/buddhism/mindfulness.asp> (diakses 17 Mei 2024).
- Kalupahana, David J. (2009). "Buddhist Approach to the Environmental Problem." Dalam *Buddhist Approach to Environmental Crisis*. Edited by Khammai Dhammasami, Phramaha Hunsu Dhammhaso, Phramaha Somboon Wutthikaro, and Dion Oliver Peoples. Thailand: The International Buddhist Conference on the United Nations Day of Vesak Celebrations: 1-38.
- Kaza, Stephanie. (2018). "Environmental Ethics An Emergent and Contextual Approach." Dalam *The Oxford Handbook of Buddhist Ethics*. Edited by Daniel Cozort and James Mark Shields. Oxford: Oxford University Press: 432-452.
- Keraf, A. Sonny. (2002). *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Kumar, Anil. (2018). "Brief Introduction of Environment, Ecology and Environmental Pollution." *Inspira-Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)* 8, No. 01: 314-322. <https://inspirajournals.com/uploads/Issues/159348613.pdf>.
- Kundu, Anamika. (2021). "Morality of Environment: Ethical Perspective of Buddha Philosophy." *International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT)* 9, No. 3: 2524-5435. <https://ijcrt.org/papers/IJCRT2103638.pdf>.
- Mondry. (2023). "Isu-Isu Lingkungan Hidup." <https://sdgs.ub.ac.id/isu-isu-lingkungan/> (diakses 17 Mei 2024).
- Phorst, Chim. (2012). "An Implementation of Buddhist Environmental Ethics For Sustainable Development in Cambodia." *Prajna Vihara* 13, No. 1-2: 137-144. <http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/PrajnaVihara/article/view/752/668>.
- Prakash, Gyan. (2018). "Buddhist Attitude towards Sustainable Development." *Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development* 13, No 1: 217-220. <https://ekorozwoj.pollub.pl/no25/za.pdf>.
- Purnama, Ita, Rina Sayekti, Sugeng, Widiyono. (2022). "Degradasi Lingkungan dan Eco-Dhamma: Solusi Menurut Pandangan Agama Buddha." *Jurnal Pencerahan* 15, No. 1: 32-39. DOI: <https://doi.org/10.58762/jupen.v15i1.69>.
- Raghawi. (2023). "Protecting Environment through the Teachings of Buddha." *Electronic Journal of Social and Strategic Studies* 4, No. 2: 220-228. <https://doi.org/10.47362/EJSS.2023.4210>.
- Rosadi. (2023). "Tujuh Isu Lingkungan Hidup yang Menjadi Perhatian Utama." <https://prefindonesia.org/tujuh-isu-lingkungan-hidup-yang-menjadi-perhatian-utama/> (diakses 17 Mei 2023).
- Sahni, Pragati. (2008). *Environmental Ethics in Buddhism: A Virtues Approach*. London and New York: Routledge.
- Samanera, Dhammadipa. (2023). "A Buddhist Perspective on Ecological Crisis and Individual Social Responsibility." <https://www.buddhistdoor.net/features/a-buddhist-perspective-on-ecological-crisis-and-individual-social-responsibility/>.

- Silva, Padmasiri de. (1998). *Environmental Philosophy and Ethics in Buddhism*, Foreword by Alastair S. Gunn. New York: Macmillan Press Ltd.
- Silva, Lily de. (2005). "The Buddhist Attitude Towards Nature." <https://www.accesstoinsight.org/lib/authors/desilva/attitude.html> (diakses 21 Mei 2024).
- Sukjam, Phubes. (2020). "Buddhadāsa's Perspective on Environmental Ethics: A Buddhist Response." https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3585603.
- Taylor, Paul W. *Respect For Nature: A Theory of Environmental Ethics*, 25th Anniversary Edition, With A New Foreword by Dale Jamieson. Oxford: Princeton University Press.
- Thathong, Kongsak. (2012). "A Spiritual Dimension and Environmental Education: Buddhism and Environmental Crisis." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 46: 5063-5068. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.386>.
- Tim Buddha Wacana. (2021). "Mengikis Keserakahan." <https://kemenag.go.id/buddha/mengikis-keserakahannbsp-bq7dgp> (diakses 21 Mei 2024).
- Verma, Mukesh Kumar. (2019). "Buddhist Way Of Sustainable Development: Theory And Practice." <https://www.undv2019vietnam.com/Subtheme-05/en/23.pdf> (diakses 18 Mei 2024).
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). (2021). "Kondisi Lingkungan Hidup di Indonesia di Tengah Isu Pemanasan Global." <https://www.walhi.or.id/kondisi-lingkungan-hidup-di-indonesia-di-tengah-isu-pemanasan-global> (diakses 17 Mei 2024).
- Wijaya, Liem Wira, dan Priastana, Jo. (2020). *Buku Saku Dhammadesana Untuk Umat Buddha*. Jakarta: Yayasan ICLEI - Local Governments for Sustainability Indonesia.
- Yamamoto, Shuichi, and Kuwahara, Victor S. (2009). "How does Buddhism Contribute to the Environmental Problems?" <http://enlight.lib.ntu.edu.tw/FULLTEXT/JR-MAG/mag215912.pdf>.
- _____. (2016). "Symbiosis with the Global Environment: Buddhist Perspective of Environmental Education." <https://buddhism.lib.ntu.edu.tw/FULLTEXT/JR-MAG/mag147447.pdf>.